

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Percepatan pembangunan bidang ekonomi memerlukan adanya penguatan struktur dan kebijakan yang mampu menopang arus lalu lintas perdagangan secara terintegrasi. Disamping pengembangan infrastruktur, pola distribusi barang dan jasa antar wilayah perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan gejolak harga di pasaran. Ketergantungan supply barang dan jasa dari wilayah lain seringkali menyebabkan terjadinya fluktuasi harga di tingkat pedagang eceran atau konsumen. Guna menciptakan stabilitas harga di tingkat perdagangan eceran secara berkesinambungan, diperlukan ketersediaan informasi yang dianggap relevan.

Salah satu alat yang bisa dijadikan sumber informasi untuk memantau pergerakan harga di tingkat konsumen adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang atau jasa. Kenaikan IHK dapat menyebabkan peningkatan suku bunga, meningkatkan pertumbuhan uang beredar, meningkatkan daya tarik mata uang, dan menaikkan inflasi.

Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah Non IHK sehingga perkembangan harga yang terjadi di tingkat konsumen tidak dijadikan dasar dalam perhitungan inflasi secara Nasional. Dengan demikian, sebagai kabupaten Non IHK, maka analisis dan pelaporan menggunakan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihitung BPS Pusat dengan sumber data dari SP2KP Kemendag setiap minggu. IPH menunjukkan bahwa terjadi Perubahan Harga yang sangat significant selama 1 Minggu pada komoditas tertentu. Dengan demikian IPH merupakan Proxy inflasi bagi Kabupaten Non-IHK.

Secara Nasional, analisis Indeks Perkembangan Harga dilakukan terhadap 20 (dua puluh) komoditas yaitu : Beras Medium, Daging ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Rawit, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung terigu, Daging Sapi, Udang, Ikan Kembung, Mie Instan, Tempe, Tahu Mentah, Pisang, Susu Bubuk Balita, Susu Bubuk dan Jeruk.

Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga komoditas pangan pilihan yang sangat berpengaruh terhadap inflasi di Kabupaten Sukabumi selama Triwulan I yaitu Periode Januari s/d Maret 2025.

1. Pada Bulan Januari 2025, Indeks perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Sukabumi sebesar 3,53 % dengan komoditas andil terbesar adalah Cabai Rawit (1.631), Cabai Merah (1.2671) dan Telur Ayam Ras (0.5193). Tingginya harga kelompok cabai disebabkan karena beberapa areal pertanian mengalami gagal panen dan rusaknya infrastruktur aksesibilitas akibat bencana alam yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2024 di Wilayah Kabupaten Sukabumi. Potensi kenaikan Komoditas Cabe dimungkinkan akan terjadi sampai dengan Bulan April 2025 pada saat Idul Fitri 2025.
2. Pada Bulan Februari 2025, Indeks perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Sukabumi sebesar 0,82 % turun dibandingkan dengan Bulan Januari 2025 dimana Komoditas komoditas yang memberikan andil terbesar adalah Minyak Goreng (0.6677), Daging Sapi (0.3065) dan Cabai Rawit (0.2339). Terkait tingginya harga Minyak goreng terutama minyak kita, disebabkan karena faktor distribusi, dimana pedagang eceran yang ada dipasar kesulitan mendapatkan harga minyak dari Distributir kedua.
3. Pada Bulan Maret 2025, Indeks perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Sukabumi sampai dengan M3 tercatat sebesar 2,14 % dengan komoditas andil terbesar adalah

Cabai Rawit (1.0767), Bawang Merah (0.6898) dan Daging Sapi (0.4031). Kenaikan harga komoditas tersebut karena meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Dilihat dari pola pergerakan harga pangan di atas maka, terdapat kecenderungan untuk beberapa komoditas sebagai penyumbang IPH Positif. Faktor utama penyebab adanya kenaikan harga beberapa komoditas di Kabupaten Sukabumi bersumber dari kelompok harga bahan makanan (*volatile food*) dibanding dengan administered prices

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kabupaten Sukabumi Pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan Kelompok volatile food seperti Cabai Rawit, Cabai Merah, Bawang Merah, Telur Ayam Ras, Daging Sapi lebih disebabkan karena rantai pasok yang belum tertata dengan baik. Para pedagang di pasar tidak sepenuhnya memanfaatkan produksi yang dihasilkan lokal Kabupaten Sukabumi.
2. Daya Tampung Hasil Produksi Kelompok volatile food pedagang di Pasar tidak sebanding dengan Jumlah Produksi yang dihasilkan petani, sehingga para petani lebih suka menjual hasil produksi ke Luar Wilayah Sukabumi.
3. Terjadinya PHK di beberapa Perusahaan Garmen akibat menurunnya omset menyebabkan Menurunnya Daya beli Masyarakat.
4. Kondisi curah hujan yang masih tinggi sampai dengan bulan Maret 2025 dapat menyebabkan kegagalan panen beberapa komoditas yang dibudidayakan di Kabupaten Sukabumi, sehingga perlu dilakukan upaya untuk optimalisasi penanganan masalah produksi, pasokan dan distribusi dalam rangka mendukung stabilitas harga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sejalan dengan kebijakan yang ditempuh di tingkat pusat, pengendalian inflasi di Kabupaten Sukabumi pada intinya diarahkan untuk mempertegas komitmen dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif).

1. Keterjangkauan Harga

TPID Kabupaten Sukabumi telah melakukan upaya-upaya selama Triwulan I yaitu :

- Melaksanakan Pemantauan Harga yang dilakukan secara Harian, termasuk Sabtu dan Minggu di 8 (delapan) pasar yaitu Pasar Cisaat, Pasar Cibadak, Pasar Parungkuda, Pasar Cicurug, Pasar Sukaraja, Pasar Palabuhanratu, Pasar Surade dan Pasar Sagaranten. Data Hasil Pemantauan Harga, di Upload kedalam Sistem Aplikasi <https://silinda.jabarprov.go.id>
- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) selama Ramadhan yaitu :
- Tanggal 03 Maret 2025 bertempat Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit.
- Tanggal 05 Maret 2025 bertempat di Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu
- Tanggal 07 Maret 2025 di Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak
- Tanggal 10 Maret 2025 di Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi

- Tanggal 13 Maret 2025 di Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung
- Tanggal 17 Maret 2025 di Desa Sukaharja Kecamatan Warungkiara
- Tanggal 18 Maret 2025 di Desa Pasanggrihan Kecamatan Sagaranten
- Tanggal 20 Maret 2025 di Kelurahan Cicurug Kecamatan Cicurug
- Tanggal 20 Maret 2025 di Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja
- Tanggal 21 Maret 2025 di Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi
- Tanggal 21 Maret 2025 di Desa Cisolok Kecamatan Cisolok
- Tanggal 24 Maret 2025 di Kelurahan Jampangkulon Kecamatan Jampangkulon
- Tanggal 24 Maret 2025 di Kecamatan Bojonggenteng
- Subsidi atau Bantuan Langsung berupa subsidi harga untuk Minyak Goreng dan Beras selama GPM

2. Ketersediaan Pasokan

Beberapa Kegiatan TPID Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan dalam rangka menjaga ketersediaan Pasokan selama Triwulan I yaitu :

- Pengelolaan Stok Pangan berupa Cadangan Pangan Pemerin Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan ketersediaan pangan saat terjadi kekurangan atau bencana alam.
- Bantuan sarana produksi pertanian berupa Penyerahan Power Thresher kepada Kelompok Tani.
- Monitoring harga/Sidak Pasar yang dilaksanakan pada :
- Tanggal 21 Januari 2025 di Pasar Cibadak, Cisaat dan Sukaraja dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Tanggal 18 Februari 2025 di Pasar Cisaat dan Pasar Sukaraja dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- Tanggal 11 Maret 2025 di Pasar Cisaat dan Pasar Cibadak dan Pasar Parungkuda, dipimpin oleh Bupati Sukabumi bersama Sekretaris Daerah.
- Tanggal 20 Maret 2025 di Pasar Palabuhanratu dipimpin oleh Bupati Sukabumi bersama Sekretaris Daerah dan Forkopimda
- Melaksanakan Gerakan Tanam Cepat Panen untuk Komoditas Cabe di Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan seluas 30 Ha pada tanggal 27 Februari 2025.

3. Kelancaran Distribusi

Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah :

- Bantuan Pangan yang diberikan kepada daerah rawan pangan dan masyarakat terdampak bencana yang terjadi pada Bulan Desember 2024 dan Bulan Maret 2025.
- Perbaikan Infrastruktur berupa Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta jembatan menuju sentra produksi pertanian untuk meningkatkan efisiensi distribusi.
- Pemantauan Distribusi yang dilakukan dari tingkat produsen, distributor, hingga pedagang pasar untuk memastikan bahan pangan tersedia di semua titik yaitu pada tanggal 21 Januari 2025 dan 12 Februari 2025.

◦

4. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif yang telah dilaksanakan TPID Kabupaten Sukabumi selama Triwulan I Tahun 2025 adalah :

- Mengikuti Rakor TPID seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang dipimpin oleh Kemendagri RI dan dilaksanakan pada hari Senin setiap minggunya.
- Mengikuti Rapat Koordinasi dwimingguan yang dilaksanakan oleh TPID Provinsi Jawa Barat
- sHigh Level Meeting yang dilaksanakan dalam Rangkaian Rapat Dinas tanggal 17 Maret 2025 dengan Tema Ketersediaan Bapokting menjelang Idul Fitri.
- Rapat Koordinasi tanggal 24 Februari 2025 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan diikuti oleh seluruh anggota TPID.
- Rapat Koordinasi tanggal 27 Februari 2025 bertempat di Pendopo Sukabumi dipimpin Sekretaris Daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pengendalian inflasi oleh TPID Kabupaten Sukabumi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara stakeholder yang berperan sebagai penentu kebijakan publik perlu lebih ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terintegrasi dan dapat memberikan solusi kepada persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan struktur pasar yang efisien.
2. Kegiatan yang dilaksanakan selama ini hanya menyasar pada persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek. Belum menjawab persoalan jangka panjang.
3. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional karena kenaikan harga setiap tahun berulang terus.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukabumi untuk diimplementasikan

1. Keterjangkauan Harga

- Mengintensifkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan Skema Subsidi pada tempat-tempat strategis atau pada saat event tertentu.
- Penguatan Peran BUMD dalam hal ini Perumda Agro Sukabumi Mandiri sebagai off taker guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga

2. Ketersediaan Pasokan

Melaksanakan Sidak Pasar atau Pemantauan ke Pasar maupun Gudang Distributor sebagai upaya normalisasi harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan pasokan apabila terjadi gejolak kenaikan harga yang tidak wajar.

- Peningkatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta memastikan bahwa KAD terealisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasokan pangan.
- Melakukan upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi melalui penggunaan varietas unggul, pengembangan bibit mandiri, percepatan tanam pada daerah irigasi, maupun optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan pada komoditas beras
- Memperluas Areal Pertanaman Cabe pada sentra Agroindustri di Kecamatan Kabandungan.
- Penguatan adopsi digital farming dalam produksi komoditas strategis.

3. Kelancaran Distribusi

- Menjamin kelancaran distribusi melalui perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang saat ini rusak akibat bencana alam.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok serta meningkatkan peran distributor dan subdistributor.

4. Komunikasi Efektif

- Melaksanakan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi tingkat Kabupaten
- Optimalisasi publikasi SiLINDA di JABAR sebagai sumber informasi harga komoditas pangan strategis di Jawa Barat.
- Mempersiapkan dan menyusun program Championship TPID Kabupaten Sukabumi untuk Tahun 2025.
- Meningkatkan kapasitas Anggota TPID melalui kunjungan kerja ke daerah yang lebih berprestasi atau melalui Workshop.